BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara dianggap maju apabila masyarakatnya hidup makmur dan sejahtera.Untuk itu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Di banyak negara didunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi.Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga di iringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi hampir di semua negara yang sedang berkembang.Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Masyarakat miskin selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam:

1. Melakukan kegiatan usaha produktif,
2. Menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi,
3. Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan

4. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Menurut Ravillion Arsyad (2010) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin pada umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit.Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan tersebut menumbuhkan perilaku dan mentalitas miskin yang dapat menyebabkan hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan hidup.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan ekonomi.Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, serta pemerataan pembangunan yang optimal, perluasaan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat.Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat hidup adil dan makmur.Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai tingkat kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun.

Usaha-usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan selain pertumbuhan ekonomi juga upaya bagaimana untuk menurunkan jumlah pengangguran, karena jika tidak demikian maka jumlah pengangguran akan terus meningkat dan menganggu proses pembangunan daerah selanjutnya. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga masalah ketenagakerjaan yang muncul juga merupakan dampak dari masalah pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan di era reformasi perlu memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ekonomi, diantaranya melalui kesempatan untuk bekerja dan berusaha guna mengurangi masalah kemiskinan yaitu pengangguran.

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki tingkat presentasi kemiskinan tertinggi ketiga setelah Papua dan Papua Barat.Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merilis persentase penduduk miskin, menggunakan konsep kebutuhan dasar *(basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Provinsi NTT pada tahun 2012 dan 2013 menurut BPS kemiskinan berjumlah 20,41%, dan di tahun 2014 mengalami penurunan 19,60%. Kemudian selama periode waktu 2015 sampai tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT mengalami kenaikan sebesar 1.159,89

ribu penduduk (22,61%) dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2021 yang kembali mencapai 1.169,31 ribu penduduk (20,99%). Dapat dilihat pada tabel berikut perbandingan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang dari tahun 2002-2021.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)Provinsi NTT DanKabupaten KupangTahun 2002-2021

NO.	TAHUN	KEMISKINAN	
		PROVINSI NTT	KABUPATEN KUPANG
1	2002	30,74	36,43
2	2003	28,62	35,42
3	2004	27,86	32,68
4	2005	28,19	33,54
5	2006	29,34	33,84
6	2007	27,51	31,32
7	2008	25,68	26,95
8	2009	23,41	24,16
9	2010	21,77	20,79
10	2011	20,48	19,54
11	2012	20,41	20,10
12	2013	20,41	19,96
13	2014	19,60	19,05
14	2015	22,61	23,37
15	2016	22,19	23,43
16	2017	21,85	22,91
17	2018	21,35	23,10
18	2019	21,09	23,03
19	2020	20,90	22,77
20	2021	20,99	22,98

(Sumber: Badan Pusat Statistik NTT, 2021)

Kemiskinan di Kabupaten Kupang selama duapuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 148,00 ribu jiwa (36,43%), kemudian yang terendah di tahun 2014 yaitu 61,02 ribu jiwa (19,05%). Ketika tingkat kemiskinan

naik maka tingkat pengangguran juga naik begitupun sebaliknya. Dalam teori, selalu ada hubungan antara kemiskinan dan pengangguran karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin.

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Provinsi NTT Dan Kabupaten Kupang Dalam Bentuk Persen Tahun 2002-2021

NO.	TAHUN	PENGANGGURAN	
		PROVINSI NTT	KABUPATEN KUPANG
1	2002	3,50	6,10
2	2003	4,10	5,00
3	2004	4,48	7,67
4	2005	5,46	6,23
5	2006	3,65	5,36
6	2007	3,72	3,72
7	2008	3,73	2,79
8	2009	3,97	3,57
9	2010	3,34	3,18
10	2011	2,69	2,25
11	2012	2,89	2,54
12	2013	3,25	3,00
13	2014	3,26	1,85
14	2015	3,83	4,15
15	2016	3,25	3,10
16	2017	3,27	3,52
17	2018	3,01	2,71
18	2019	3,35	4,48
19	2020	4,28	4,90
20	2021	3,77	3,99

(Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, 2021)

Terlihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi NTT dari tahun ketahun mengalami fluktuasi.Pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan namun, kembali meningkat selama sembilan tahun terakhir dari tahun 2013-2021. Pada tahun 2020, pengangguran di Provinsi NTT naik sebesar 4,28 persen atau

sebanyak 0,12 juta orang, yang berarti meningkat 1,14 persen poin atau meningkat sebesar 0,04 juta orang dibanding dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena terdapat 373,22 ribu orang yang terdampak covid-19. Terdiri dari pengangguran karena banyak sekali karyawan yang kehilangan pekerjaan dan terkena covid-19 sehingga di berhentikan secara paksa oleh perusahaan.

Pengangguran di Kabupaten Kupang selama sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun di tahun 2014 menurun menjadi 1,85 persen. Besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Kabupaten Kupang Tahun 2002-2021

NO.	TAHUN	PDRB	
		PROVINSI NTT	KABUPATEN KUPANG
1	2002	4,77	5,10
2	2003	3,46	3,46
3	2004	5,08	4,18
4	2005	5,15	4,43
5	2006	4,48	3,92
6	2007	4,29	4,15
7	2008	5,25	4,22
8	2009	5,62	4,71
9	2010	5,41	4,42
10	2011	5,56	4,69
11	2012	5,04	5,46
12	2013	5,07	5,41
13	2014	5,10	5,05
14	2015	5,05	5,02
15	2016	4,81	5,12
16	2017	5,10	5,11
17	2018	5,11	5,11
18	2019	5,12	5,25
19	2020	0,80	-0,84
20	2021	2,57	2,51

(Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi NTT, 2021)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas harga berlaku Provinsi NTT hanya sebesar Rp 20,58 juta per tahun pada tahun 2021. Artinya, pendapatan penduduk Provinsi NTT merupakan yang terendah dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya. Pertumbuhan PDRB dari tahun 2012-2019 sangat stabil hingga ditahun 2020 mengalami kontraksi hingga -0,84 persen dan kembali meningkat ditahun 2021. Meskipun pertumbuhan PDRB ditahun 2021 meningkat menjadi 2,51 persen, tetapi nilai tersebut termasuk dalam kriteria tidak stabil atau rendah.

Selama sepuluh tahun terakhir, nominal nilai tambah dari aktifitas ekonomi Kabupaten Kupang cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun, dari sisi nilai rill, Kabupaten Kupang mengalami kontraksi perekonomian pada tahun 2020 yang ditandai dengan menurunnya nilai tambah rill tahun tersebut, sebesar (-0,80) persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan perekonomian di tahun tersebut. Pada tahun 2021 PDRB nominal maupun rill Kabupaten Kupang mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2020, yakni sebesar 2,78 persen. Hal ini mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian di Kabupaten Kupang setelah pandemi covid-19.

Menurut BPS Kabupaten Kupang, tahun 2012 hingga 2019 diketahui bahwa meskipun pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Kupang meningkat setiap tahun, namun terjadi perlambatan laju pertumbuhan perkapita pada tahun 2020

dan 2021 dimana laju pertumbuhan PDRB perkapita hanya tumbuh sebesar 2,78 persen dari tahun 2020. Nilai tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita periode 2012-2019.

Berdasarkan penjelasan dan data diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Dari kemiskinan dan pengangguran yang terus bertambah serta pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil bahkan cenderung menurun, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:**"Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadaptingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang ''**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadaptingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang?
2. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang.

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan atau pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan dari penelitian terdahulu agar dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan referensi mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomidan tingkatpengangguran terhadaptingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan terkait masalah kemiskinan.